

Konstruksi Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Gerakan Sosial di Madura

Sirojul Arifin Shofa

Universitas Annuqayah

E-mail: asshofa91@icloud.com

Ridan Muhtadi

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail: ridanmuhtadi@gmail.com

Abstract

Madura Island remains one of the regions with the highest poverty rates in East Java Province. In this context, Islamic microfinance institutions (IMFIs) play a strategic role in empowering low-income communities. This study aims to explore the social movement strategies employed by three IMFIs affiliated with Nahdlatul Ulama—namely Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU, and BMT Sidogiri—in promoting economic empowerment among rural communities in Madura. Adopting a qualitative approach through field research, the study collected data via in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that these institutions integrate Islamic values and Nahdliyyin cultural identity in four key strategies: religious organizational militancy, the pivotal role of pesantren, continuous mentoring models, and innovative service products. These empowerment movements have not only enhanced local economic participation but also reinforced culturally rooted social networks as a foundation for sustainable people-based economic development.

Keywords: *Islamic Microfinance, Economic Empowerment, Nahdlatul Ulama, Social Movement, Madura*

Abstrak

Pulau Madura merupakan kawasan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi elemen strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi gerakan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro syariah berbasis Nahdlatul Ulama—yakni Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU, dan BMT Sidogiri—dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Madura. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research), peneliti menggali data melalui observasi partisipatif, wawancara

mendalam, dan dokumentasi terhadap praktik pemberdayaan ekonomi lokal. Temuan menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut mengembangkan strategi pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Nahdliyyin melalui empat pendekatan utama: militansi tokoh dan organisasi keagamaan, peran pesantren, model pendampingan berkelanjutan, serta inovasi produk layanan. Gerakan pemberdayaan ini tidak hanya menumbuhkan partisipasi ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat jejaring sosial berbasis kultural dan religius sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Keuangan Mikro Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Nahdlatul Ulama, Gerakan Sosial, Madura

Pendahuluan

Pemberdayaan sudah mulai dikenal tahun 1980 yang bersamaan dengan diseminasi *good governance* di dunia. Sedangkan gaung pemberdayaan di Indonesia dimulai pada akhir tahun 2006.¹ Pemberdayaan sendiri lebih banyak identik dengan koperasi dan *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT), sebab koperasi dan BMT langsung bersentuhan dengan lingkungan masyarakat kecil dan menengah. Keduanya sering disebut salah satu langkah efektif dalam pemberdayaan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.² Pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan koperasi menggunakan sumber keuangan masyarakat dapat menerapkan pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan (*sustainable*).³

Pengentasan kemiskinan di level rendah menjadi prioritas kinerja koperasi. Koperasi bisa berperan menhadapi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial untuk terus berupaya menanggulangi serta meminimalisir tingkat kemiskinan.⁴ Diketahui secara bersama bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan sosial, tetapi ada beberapa faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut seperti, tingkat pendidikan yang rendah,

¹ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal ASKETIK Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016, 45-55, 48.* <https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/410>

² Handayana, Rachmad, and Sjahrul Bustaman. "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor* (2007). Hlm, 29-38.

³ Disampaikan oleh Asih Marini Wulandari pada acara *Business Conference* tanggal 6 Desember 2012 di Fisip Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dengan judul "*Microfinance Syariah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*", 2. http://repository.upnyk.ac.id/4833/3/3_Asih_ABUPNYK.pdf

⁴ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal Asketik Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016, 45-55, 45.* <https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/410>

kepemilikan lahan yang semakin sempit, akses informasi serta akses ke pasar yang sangat sulit.⁵

Di era perekonomian global saat ini, koperasi dan *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia sebenarnya merupakan penggerak perekonomian secara masif di kancan nasional. Daya saing yang sangat ketat sudah sangat terasa, masyarakat yang tidak dapat mengejar perkembangan zaman digitalisasi saat ini, tidak bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Maka dari itu, harus ada revitalisasi dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik secara nasional maupun secara internasional melalui rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.⁶

Lembaga keuangan mikro merupakan usaha pemberdayaan skala kecil-menengah dengan posisi strategis. Lembaga tersebut tidak hanya menjadi penyedia layanan akses ekonomi seperti permodalan, lebih dari itu keuangan mikro menjadi penggerak ekonomi umat dari tingkat *low* (rendah) *middle* (menengah). Lembaga keuangan mikro merupakan sarana penting untuk meningkatkan produktivitas umat.⁷

Model lembaga keuangan mikro Islam yang sangat fenomenal di Indonesia seperti *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang disebut cara paling tepat untuk pengentasan kemiskinan di dunia. Segmen BMT menyasar dan sangat cocok untuk kaum yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf kehidupan.⁸

Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri adalah lembaga keuangan mikro Islam yang banyak digandrungi oleh masyarakat di pulau Madura. Ketiga lembaga tersebut berafiliasi langsung dengan organisasi Islam terbesar di tanah air ini ialah Nahdlatul Ulama'. Gerakan dari masing-masing lembaga saling melengkapi, bersaing dan saling bekerjasama. Koperasi An-Nisa' Muslimat NU dipelopori oleh gerakan ibu-ibu Muslimat NU, BMT NU dipelopori oleh gerakan bapak-bapak pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Gapura Sumenep dan BMT Sidogiri di pelopori oleh gerakan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan.

Di Indonesia pada umumnya ekonomi syariah melalui gerakan-gerakan yang dimunculkan akhir-akhir ini sudah mulai memberikan hasil, tetapi perlu

⁵ Jhon Kenneth Galbraith. "*The Nature Mass Peverty*" (London: Harvard University Press, 1979), 32.

⁶ Disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang diwakili oleh Agus Muharam (Sekjen Kemenkop UKM) pada acara Kongres XVII Muslimat NU pada tanggal 25 November 2016 di asrama haji Pondok Gede Jakarta.

⁷ Mohammed El-Komi & Rachel Croson, *Experiment in Islamic Microfinance*. (Dallas: University of Texas, 2011), 1-2.

⁸ Hans Dieter SEIBEL, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 1 (2008): 86–103, <https://www.jstor.org/stable/41220061>.

kerja keras lagi untuk bisa bersaing dengan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama dipakai oleh banyak Negara. Ada yang berpendapat bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia sendiri secara khusus ialah ekonomi pancasila sebab sistem perekonomian yang diusung di Indonesia merupakan sistem perekonomian pancasila yang lebih mendekati kepada sistem ekonomi secara syariah, sekalipun sistem ekonomi pancasila masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut para penggiat ekonomi Islam,⁹ Nurullah¹⁰ mengatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia saat adalah sistem demokrasi ekonomi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian sebelumnya. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah demokrasi ekonomi pancasila yang memiliki ciri-ciri: *pertama*, perekonomian yang berlandaskan pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting dipertimbangkan adalah moral, *kedua*, perekonomian berazaskan pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial, *ketiga*: perekonomian berdasarkan Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme mempengaruhi kebijakan ekonomi, *keempat*: sistem perekonomian pancasila tegas serta jelas adanya keseimbangan (*equality*) perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.¹¹

Lembaga-lembaga keuangan mikro syariah di Madura harus bisa menciptakan harapan baru dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Sebab kemiskinan musuh semua agama¹² dan harus segera dihapuskan agar manusia mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada tabel 1.1 Peneliti memberikan gambaran tabel persentase penduduk miskin di 4 (empat) Kabupaten Madura dengan harapan Peneliti dapat membandingkan secara tepat posisi perekonomian dari 4 (empat) Kabupaten tersebut

⁹ Sistem tersebut pernah dipakai oleh penguasa orde baru pada saat itu, akan tetapi hal tersebut dijadikan perantara dalam mempertahankan kepentingan penguasa. Saat ini segala ajaran yang berbau orde baru, termasuk system ekonomi pancasila juga dianggap tidak pantas lagi untuk disebut-sebut kembali. Coba lihat Mubyarto “*Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*” dalam bukunya “*Ekonomi Kerakyatan*” (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014). Hlm, 4.

¹⁰ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama’ (STISNU) Nusantara Tangerang Banten.

¹¹ Nurullah “Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia” *Jurnal HIKAMUNA Edisi 1 Vol. I Tahun 2016*, 16-32, 16.

¹² Taufik, “Kemiskinan, Perempuan dan Agama”. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 145-164, (Juni, 2015), 150. <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i1.325>

Tabel 1.1
 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun
 2017-2019

KOD E	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
3526	Kab. Bangkalan	206,53	191,33	186,11	21,32	19,59	18,9
3527	Kab. Sampang	225,13	204,82	202,21	23,56	21,21	20,71
3528	Kab. Pamekasan	137,77	125,76	122,43	16,00	14,47	13,59
3529	Kab. Sumenep	211,92	218,6	211,98	19,62	20,16	19,48

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di pulau Madura masih sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur lainnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat Madura kebanyakan masih bertumpu kepada satu sektor saja yaitu, sektor perkebunan. Baik perkebunan tembakau ataupun perkebunan tebu. Bahkan daerah bangkalan mencapai 21,32%, Sampang 23,56%, Pamekasan 16,00% dan Sumenep 19,62%. Persentase tersebut mencapai 3-4 kali lipat ketimpangan kemiskinan di daerah sekitarnya seperti Surabaya 5,39% dan Sidoarjo 6,23%. Dengan itu, adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura sangat diharapkan menumbuhkan sifat inovatif, kreatif dan rasa kemandirian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Madura.

Kemiskinan tersebut juga dipicu oleh indeks pembangunan manusia serta pendidikan yang rendah di pulau Madura, masalah tersebut menjadi masalah serius untuk bahan perbaikan bagi kabupaten-kabupaten di pulau Madura. Dibuktikan data yang dikeluarkan badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur. Lihat tabel 1.2 indeks pembangunan manusia 2013-2018 dan tabel 1.3 angka partisipasi sekolah di Madura tahun 2014-2015.

Tabel 1.2
 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Madura Tahun 2013-2018

KAB.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bangkalan	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30	62,87
Sampang	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90	61,00

Pamekasan	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93	65,41
Sumenep	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	65,25

Sumber: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1.2 menggambarkan keadaan indeks pembangunan manusia dan angka partisipasi sekolah di pulau Madura sangat memprihatinkan dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk ikut andil memberdayakan masyarakat Madura demi mencapai kemaslahatan secara bersama.

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia memang mengalami pasang surut, akan tetapi setidaknya Muslimat NU, MWC NU Sumenep dan Pondok Pesantren Sidogiri secara intensif menggerakkan program perekonomian, turut serta membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi nasional di tengah arus globalisasi. Muslimat, MWC NU Sumenep dan Pondok Pesantren Sidogiri menggerakkan perekonomian melalui perekonomian berbasis pesantren dan masyarakat yang Islami, yang kemudian menghasilkan koperasi An-Nisa Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri dengan menghasilkan berbagai produk-produk yang berkualitas dan bermanfaat buat masyarakat luas terutamanya di sekitar pesantren. Jejaring pesantren yang sangat luas dapat mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹³ Untuk memulai kebangkitan pada dua pilar,¹⁴ Muslimat NU harus memulainya melalui pesantren. Harus diakui pula potensi pendidikan sekaligus ekonomi terbesar Muslimat NU terletak pada pondok pesantren. Pesantren yang secara kultural dan struktural berada di bawah naungan lembaga ini jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, mendominasi jumlah pesantren di Indonesia dan tersebar hingga pelosok-pelosok negeri ini. Apabila potensi ini bisa dimaksimalkan, Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri menjadi penggerak, sekaligus motor utama bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di negeri tercinta kita ini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pemberdayaan ekonomi berbasis keuangan mikro syariah di Pulau

¹³ Diakses dari laman: <http://www.nu.or.id/post/read/63295/pesantren-sidogiri-mercusuar-pengembangan-ekonomi-syariah> pada tanggal 24 Juni 2021.

¹⁴ Maksud dua pilar adalah dua pilar yang terpinggirkan sebagai semangat baru untuk NU. Dua pilar tersebut ialah pendidikan dan perekonomian, komitmen mengusung dua pilar dipertegas dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang.

Madura.¹⁵ Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, strategi, dan dinamika sosial dalam gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah berbasis Nahdlatul Ulama. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari pengelola Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU, dan BMT Sidogiri, serta masyarakat penerima manfaat dari program pemberdayaan. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan dan pengalaman mereka dalam program pemberdayaan ekonomi. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti memastikan validitas data melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna meningkatkan keabsahan temuan. Seluruh proses analisis difokuskan untuk menggambarkan strategi pemberdayaan, relasi sosial keagamaan, serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat Madura.

Hasil dan Pembahasan

Pulau Madura sering dikenal dengan basis Nahdlatul Ulama (NU)¹⁶ oleh banyak kalangan, sebab rata-rata masyarakat Madura anggota dari Nahdlatul Ulama'.¹⁷ Banyaknya anggota dan simpatisan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama' dapat memberikan ruang tersendiri bagi organisasi tersebut dalam memberdayakan para loyalisnya pada bidang perekonomian. Hal tersebut tergambar bahwa rata-rata dilihat pada laporan BPS (Badan Pusat Statistik) prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 2018, pulau Madura

-
- ¹⁵ Moleong, Lexy. J, "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 3.
- ¹⁶ Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (June 15, 2013): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.
- ¹⁷ Periode setelah berdirinya NU pada tahun 1926, penurunan SI (Sarekat Islam) di Madura menandai era baru dalam sejarah orang Madura. Asosiasi SI (Sarekat Islam) dengan sikap-sikap modern dan reformasi tidak berhasil menarik orang Madura untuk terlibat dalam ranah politik. Menyusul penurunan SI, NU memainkan peran sentral dengan pengikut pedesaan. Orang-orang tertarik pada NU terutama karena orientasi non-politik organisasi pada awal berdirinya, sedangkan orientasi politik SI menyebabkan hilangnya pengikut. Seperti di Jawa, di Madura sebagian besar Nahdliyin (diciptakan untuk menyebut pengikut NU) memandang NU terutama sebagai organisasi keagamaan, dan bukan asosiasi politik. NU telah menjadi populer dan mengambil alih posisi SI pada akhir 1920-an, sebagai organisasi yang mampu menyebar ke daerah pedesaan. Refleksi kehidupan Muslim pedesaan di kepulauan berpusat di pesantren. Bagi banyak santri di Madura, menjadi seorang Muslim berarti menjadi simpatisan NU. Identifikasi yang kuat dengan NU ini tidak secara otomatis berarti bahwa mereka harus secara resmi menjadi anggota organisasi. Mereka dianggap terlahir sebagai Nahdliyin sejati yang akan menjaga prinsip-prinsip Islam *Abl al-Sunnah wa al-jama'ah* dan mematuhi instruksi para kiai.

merupakan pulau penyumbang terbesar penduduk miskin. Diantaranya Kabupaten Bangkalan 19,59%, Kabupaten Sampang 21,21%, Kabupaten Pamekasan 14,47% dan Kabupaten Sumenep 20,16%.¹⁸

Nahdlatul Ulama' memiliki pekerjaan rumah (PR) yang sangat besar untuk membantu pengentasan kemiskinan khususnya di pulau Madura. Kemiskinan masalah struktural, strategi pengentasan kemiskinanpun harus secara komprehensif, sistematis dan institusional. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance*) merupakan lembaga yang telah terbukti sangat efektif mengatasi kemiskinan di semua Negara berkembang, juga termasuk di Indonesia. Contoh keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan lembaga keuangan mikro ini adalah apa yang telah dipelopori oleh seorang profesor dari Bangladesh bernama Muhammad Yunus dengan gerakan Grameen Bank.¹⁹ Saat ini pola pemberdayaan kaum miskin model Grameen Bank telah diadopsi oleh lebih dari 130 negara di seluruh dunia.²⁰

Hemat Peneliti, Peneliti melihat masyarakat Madura telah mengalami pergeseran dalam sosiologi generasi, yang beralih dari dimensi konflik nilai sosial budaya ke dinamika ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan hubungan kekuasaan, dengan kaum millennial pada transformasi ini. Digambarkan sebagai generasi yang lahir antara awal 1980-an dan awal 2000-an, milenium ialah generasi yang paling terdidik, namun mereka dihadapkan pada sosial ekonomi yang paling sulit dan meningkatkan situasi ketimpangan generasi sepanjang masa. Ini diwujudkan melalui penurunan berkelanjutan dalam pekerjaan kaum muda, perumahan yang terjangkau, kesejahteraan sosial dan tunjangan, akses keuangan dan masih ada sebagian tingginya biaya pendidikan di institusi pendidikan tertentu. Ini menimbulkan situasi yang sangat menantang dengan tekanan pada kaum muda, meningkatnya ketegangan di antara generasi yang lebih tua dan kegelisahan tentang generasi yang akan datang.²¹

¹⁸ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> (diakses pada Jum'at, 13 September 2019).

¹⁹ Katharine Esty, "Lessons from Muhammad Yunus and the Grameen Bank: Leading Long-Term Organizational Change Successfully," in *Leading and Managing in the Social Sector: Strategies for Advancing Human Dignity and Social Justice*, ed. S. Aqeel Tirmizi and John D. Vogelsang, Management for Professionals (Cham: Springer International Publishing, 2017), 31–39, https://doi.org/10.1007/978-3-319-47045-0_3.

²⁰ Samuel O. Idowu et al., eds., "Lending for Poverty Eradication, Professor Muhammad Yunus," in *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013), 1585–1585, https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100988.

²¹ Howe, N. and Strauss, W. "*Millennials Rising: The Next Great Generation*". (New York: Vintage Books, 2000), 234.

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi milenium telah menjadi bagian integral yang tak terhindarkan dari rencana dan upaya pembangunan berkelanjutan secara global, dengan pengembangan kewirausahaan disarankan sebagai pintu gerbang penting. Argumen di balik ini adalah bahwa mempromosikan kewirausahaan kaum muda tidak hanya akan memfasilitasi pertumbuhan pasar yang inklusif, menghasilkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan,²² itu akan juga memprovokasi inovasi yang mengganggu untuk pertumbuhan ekonomi yang efektif dan kemakmuran.²³ Tidak perlu dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan muda yang mendorong inovasi yang mengganggu, dan strategi investasi menarik yang menargetkan kebutuhan lokal, merupakan hal mendasar untuk pembangunan berkelanjutan.²⁴

Problematika Nahdlatul Ulama' sementara ini masih juga sering dipandang sebagai organisasi yang stagnan (*jumud*), tidak terlalu mampu merespon terhadap berbagai perubahan masa kini dan tidak terlalu mempunyai kemampuan untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas sufistik dalam ajaran Nahdlatul Ulama', dimana memperlihatkan pengabaian mereka terhadap kehidupan duniawi serta sebaliknya hanya berorientasi kepada kebahagiaan di akhirat.²⁵ Dengan realitas keagamaan semacam itu, kemudian Nahdlatul Ulama' dikenal sebagai kelompok masyarakat yang pasif terhadap tantangan dinamis modernisasi, dan komunitas dimana para tokoh agamanya memegang secara ketat tradisi yang mati.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama' memiliki kendala yang lebih banyak disebabkan rata-rata masyarakat Nahdlatul Ulama' berada dalam garis angka kemiskinan dan terbelakang, terutama di desa-desa dan pelosok-pelosok negeri ini memiliki aksesibilitas rendah.²⁶ Problem tersebut

²² World Bank. "Nigeria: Poverty in the Midst of Plenty: The Challenge of Growth with Inclusion: A World Bank Poverty Assessment". World Bank, Washington, DC, 1996), 97. Bisa dilihat juga dalam jurnal Emmanuel O. Okon, "MSMEs Performance in Nigeria: A Review of Supply Chain Collaboration Challenges," *International Journal of Marketing Research Innovation* 2, no. 1 (January 20, 2018): 16–30, <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijmri/article/view/103>.

²³ Christensen, Clayton M., Efosa Ojomo, and Derek van Bever. "Africa's New Generation of Innovators". *Harvard Business Review* 95, no. 1 (January-February 2017): 129-136.

²⁴ Ikedinachi K. Ogamba, "Millennials Empowerment: Youth Entrepreneurship for Sustainable Development," *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2018-0048>.

²⁵ Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Fealy, Greg, Barton, Greg (ed.), "Tradisional Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara". (Yogyakarta: LKiS, 1997), 7.

²⁶ Hal ini pernah diungkapkan oleh Khofifah Indar Parawansa ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU di rapat pimpinan Muslimat NU <https://www.suara.com/news/2017/03/26/183134/khofifah-sebut-nahdliyin-banyak-yang-miskin-dan-terbelakang> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019). Pada tahun 2012 Nusron Wahid sebagai Ketua Umum GP Ansor menyampaikan bahwa dari angka kemiskinan 29 juta

pernah disampaikan oleh KH. Mahfudz Shiddiq²⁷ pada acara kursus pengurus Nahdlatul Ulama' cabang Gresik 08 Muharrom 1358 H:

‘Nahdlatoel Oelama soedab bertindak tiga belas taboen lamanja. Sepandjang pendapatana para pengemoedinja bahwa kelambatan atau terbentinja (tidak berhasilnja) beberapa banjak oesahanja sehingga perdjalanana NO menoedjoe ke pokok toedjoeannja mendjadi terbalangi atau terhambat adalah karena NO menghadapi rintangan jang maha heibat, jaitoe kemiskinnanja oemat Islam!! perdjalanana NO menoedjoe ke pokok toedjoeannja, tersentoh (kesrimpat=jv) oleh kemiskinnanja oemat Islam.’²⁸

Seiring berjalannya waktu Nahdlatul Ulama' terus berbenah dalam hal memberdayakan masyarakat kecil demi menghapuskan disparitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ialah salah satu bentuk solusi yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama', dengan berkerja sama dengan berbagai institusi keuangan ataupun pesantren, Nahdlatul Ulama' mampu memberikan sumbangsih terhadap pengurangan angka kemiskinan di pulau Madura. Seperti yang dilakukan oleh BMT Sidogiri, BMT NU dan Koperasi An-Nisa' Muslimat NU berlomba-lomba memberdayakan kaum miskin sekitar dengan visi misi besar menciptakan kemaslahatan bersama berasaskan Syariat Islam.²⁹ Dari tiga lembaga keuangan mikro syariah tersebut, didirikan oleh tokoh-tokoh terbaik Nahdlatul Ulama' sebagai jawaban tantangan zaman ke depan. Dengan begitu sesuai dengan harapan bisnis yang pernah disampaikan oleh KH. Mahfudz Shiddiq agar bisa mengatur bisnis sesuai aturan Islam. KH. Mahfudz Shiddiq menyampaikan:

“Oleh kemiskinnanja oemat Islam, dan oleh sebab terlepasnja oeroesan2 jang berkenaan dengan masjarakat ramai, misalnja hal perdagangan dan segala sesoeatoe jang

ketika itu, 18,5 juta rata-rata merupakan masyarakat Nahdliyin <https://nasional.tempo.co/read/417437/rata-rata-orang-miskin-indonesia-warga-nu> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019).

²⁷ Putra dari KH. Muhammad Siddiq Jember, kakak kandung dari KH. Ahmad Siddiq (Rois 'Aam PBNU 1984-1991) serta paman dari KH. Hamid Pasuruan. KH. Mahfudz Siddiq juga mantan ketua tanfidziyah PBNU termuda yang terpilih dalam Mukhtamar Nahdlatoel Oelama di Malang pada tahun 1937 M mendampingi KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rois 'Aam ketika itu.

²⁸ Berita Nahdlatoel Oelama, 15 Februari 1939, hlm, 171.

²⁹ Bisnis berasaskan Islam memang sudah menjadi para Masyaikh Nahdlatul Ulama' sejak lama, diharapkan usaha yang berlandaskan nilai-nilai keIslaman dapat menjadi berkah dan kesuksesan pada masa mendatang. Dalam mengatasi kemiskinan, solusi yang ditawarkan oleh HBNO (Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama) atau sekarang dikenal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi di dalam menjalankan bisnis bagi warga Nahdlatul Ulama' yang terpenting adalah pemenuhan syariat di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Mahfud Shiddiq:

“Tegeslah soedab bahwa perhatian NO terhadap pada ekonomie, boekanlah berarti NO soedab beroebah sifatnja, dari perhimpoean keigamaan, mendjadi perhimpoean dagang, tidak sekali-kali, banjasenja perhatiannja NO terhadap soeal ekonomie itoe, sekedar oentoeke bisa melangkah kepada pokok toedjoeannja jang pertama kali, jaitoe berkembangnja dan berlakoenja Sjaru' Islam (djam'ijatoen dienijjatoen machdlah.”

*bersangkutan dengan perdagangan (sewa menjewa dllnja) jang mana oeroesan2 itoe djatoeh didalam tangannya lain golongan, maka sesoeatoe peratoerannya, sjarath roekoennja dllnja, tentoe diatoer menoeroet sebagaimana mereka soeka dan mereka pandang baik, sedang kita orang Islam, oleh sebab tidak mempoenjai apa-apa jang menjebakkan kita toeroet mengatoernja, terpaksa menoeroet tjara dan djalannya para pedagang2 itoe, walaupun tiada koerang2 jang menjalabi, atau bertentangan atau ditentang oleh Islam, misalnja riba, speculacie makanan (djoel beli barang makanan sebeloem gabadl) dllnja tjara dagang zaman sekarang.*³⁰

BMT hadir baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di pulau dituntut bisa membantu mengentaskan kemiskinan serta pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Salah satu konsep yang diusung oleh BMT ialah *empowerment* (pemberdayaan)³¹, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan, pesisir serta pelosok-pelosok daerah. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat menjadi subyek dari *agent of change* (agen perubahan), maka dengan itu diperlukan pendekatan dan pembinaan dari pihak BMT. Menurut Khusniati Rofiah, BMT dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM dengan *Authority, Confidence and competence, Truth, Opportunity, Responsibility dan Support* (ACTORS):³²

1. *Authority* (wewenang)

Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka. Masyarakat miskin diberikan sebuah kepercayaan bahwa hidup harus berubah ke arah yang lebih baik.

2. *Confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan diri)

Pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.

3. *Truth* (keyakinan)

Memberikan keyakinan kepada masyarakat atau seseorang harus selalu yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.

4. *Opportunity* (kesempatan)

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

³⁰ Berita Nahdlatol Oelama, 15 Februari 1939, hlm 172.

³¹ Stefanie Chambers, "Minority Empowerment and Environmental Justice," *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.

³² Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (December 1, 2010): 1-22–22, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.755>.

5. *Responsibility* (tanggung jawab)

Perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggungjawab adalah dengan senantiasa menjaga kepercayaan dengan BMT.

6. *Support* (dukungan)

Adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

Gerakan pemberdayaan yang diusung oleh BMT dan Koperasi berbasis syariah di Madura menurut para tokoh Nahdlatul Ulama' harus lebih bisa profesional, kompeten, inovatif, kreatif, dan canggih bila ingin benar-benar memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Sebab persaingan usaha semakin ketat, diharapkan para pemangku kebijakan termasuk pula pemerintah setempat memberikan dukungan dan kebijakan yang pro rakyat kecil, utamanya masyarakat Madura.³³ Gerakan pemberdayaan sendiri sudah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an seperti, menjunjung etos kerja, etos transformasi, etos intelektual, etos penghargaan dan etos sosial.³⁴

Dominasi kaum *Nahdliyyin* di pulau Madura menjadi *opportunity* (peluang) bagi pengurus *Bayt al-Maal wat Tammil* (BMT) dalam menyediakan akses keuangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha bagi masyarakat pedesaan serta masyarakat pesisir Madura. Tiga lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi obyek penelitian Peneliti digagas oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama', sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan mereka kepada masyarakat sekitar utamanya warga Nahdlatul Ulama' yang masih banyak berada dalam garis kemiskinan. Melihat trend peningkatan anggota serta aset yang dimiliki oleh Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri di daerah Pamekasan, Peneliti bisa berharap memberikan harapan baru bagi kesejahteraan serta iklim usaha masyarakat Madura. Komitmen lembaga keuangan mikro syariah di Pulau Madura harus selalu didukung oleh semua elemen masyarakat, baik para kiyai,

³³ KH. Sahal Mahfudz memberikan langkah-langkah terkait gerakan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi pemangku kebijakan Nahdlatul Ulama' di semua tingkatan dengan: *Pertama*, menentukan obyek pemberdayaan. Langkah ini mengidentifikasi terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. *Kedua*, penggunaan media yang sesuai dengan obyek sasaran pemberdayaan. *Ketiga*, menggunakan strategi yang tepat agar tujuan yang dicapai bisa diekskusi dengan baik. *Keempat*, membuat *planning* (perencanaan) yang matang. *Kelima*, menggunakan pendekatan partisipatif selama proses pemberdayaan. Dengan langkah strategis tersebut diharapkan masyarakat NU terutamanya di pulau Madura dapat menumbuhkembangkan etos kerja, etos transformasi, etos intelektual, etos penghargaan dan etos sosial yang tinggi. Lihat pula dalam Sahal Mahfudh. "Nuansa Fikih Sosial". Cet. II. (Yogyakarta: LKiS, 2003), 97.

³⁴ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmadi Syafie. "Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi". (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 28.

tokoh, peneliti, pemerintah ataupun *stakeholder* yang berkepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Strategi Relasi dan Pemberdayaan

1. Militansi Organisasi dan Tokoh Masyarakat

Nahdlatul Ulama' sudah menjadi identitas masyarakat Madura, selayaknya Nahdlatul Ulama' memikirkan strategi terbaiknya untuk bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Madura. Dalam mengimplementasikan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat *Nabdliyyin* tidaklah semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan kerangka dan konsep pemberdayaan ekonomi berasaskan nilai-nilai keIslamaan.³⁵ Faktanya memang membutuhkan penelaahan teks-teks ayat Al-Qur'an, hadits serta pendapat para ulama untuk menciptakan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ideal serta islami. Landasan keagamaan dalam implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal urgen, sebab saat ini umat Islam dihadapkan pada praktik ekonomi global yang bersandarkan pada paham kapitalisme. Secara prinsipil kapitalisme hendak mewujudkan agenda liberalisasi ekonomi di semua sektor kehidupan.³⁶

Pemberdayaan ekonomi di pulau Madura pada dasarnya membutuhkan perhatian dari banyak pihak, utamanya pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para Ulama', tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang lain ikut semangat membangun kesejahteraan masyarakat Madura secara bersama-sama. Organisasi memiliki peran penting dalam mendukung perempuan, laki-laki dan rumah tangga, serta berharap mereka mendapatkan kesejahteraan. Organisasi dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat seperti layanan konseling dan dukungan, peningkatan kesadaran dan advokasi, bantuan hukum dan keuangan mikro. Layanan tersebut dapat membantu orang untuk mencapai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mereka, serta mengendalikan hidup mereka sendiri dan akhirnya menjadi diberdayakan.³⁷ Di sisi lain, Stromquist³⁸ telah mencatat tiga fungsi utama organisasi masyarakat seperti, pemberian

³⁵ R. Andi Irawan, "Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 169–82, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/11/7>.

³⁶ Qodri A. Azizy. "Melawan Globalisasi". Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 56.

³⁷ Vandana Desai, "NGOs, Gender Mainstreaming, and Urban Poor Communities in Mumbai," *Gender and Development* 13, no. 2 (2005): 90–98. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332290>

³⁸ Teegen, Hildy, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani. "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda." *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463-83. <http://www.jstor.org/stable/3875234>.

layanan kesejahteraan, keterampilan dasar, penyediaan pendidikan seperti keterampilan dasar dan analisis lingkungan sosial yang sering kritis. Organisasi dengan berbagai relasinya bisa menghasilkan produk pemberdayaan bagi kaum miskin,³⁹ khususnya perempuan miskin, melalui kombinasi kredit mikro, peningkatan kesadaran, pelatihan untuk anggota kelompok, dan layanan sosial lainnya.⁴⁰

Tiga lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT NU dan BMT UGT Sidogiri masing-masing memiliki relasi tersendiri, baik dari tokoh masyarakat, Kiyai, Ibu Nyai, ataupun dari pengusaha sesama mikro.

2. Pondok Pesantren

Perspektif para pakar tentang pondok pesantren secara mayoritas mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pendidikan tradisional yang masih mempertahankan pembelajaran kitab-kitab klasik.⁴¹ Jika kita melihat potensi yang dimiliki oleh pesantren sekarang ini sebagaimana pendapat Azyumardi Azra pesantren saat ini sangat diharapkan tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya⁴² seperti transmisi, transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama. Pesantren juga harus menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan tidak kalah penting juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Maka, dari itulah fungsi pondok pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama bisa juga dikatakan "Ulama" (*center of excellence*), lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).⁴³

Dengan *power* (kekuatan) yang dimiliki pesantren, pesantren mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi *role models* (panutan)

³⁹ Ahmad Suhendi, "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *Informasi* 18, No. 2 (1 Juli, 2013): 105-116, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>

⁴⁰ Biswajit Ghosh, "NGOs, Civil Society and Social Reconstruction in Contemporary India," *Journal of Developing Societies* 25, no. 2 (April 1, 2009): 229-52, <https://doi.org/10.1177/0169796X0902500205>.

⁴¹ Arief Subhan, "*Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*." (Jakarta: Kencana, 2012), 189. Lihat juga dalam Oman Fathurahman, "Jaringan Ulama: Pembaharuan Dan Rekonsiliasi Dalam Tradisi Intelektual Islam Di Dunia Melayu-Indonesia," *Studia Islamika* 11, no. 2 (2004): 361-85, <https://doi.org/10.15408/sdi.v11i2.606>.

⁴² Azyumardi Azra. "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*." (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

⁴³ Amin Haidari, dkk. "*Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*." (Jakarta: IRD Press, 2004), 193-194.

pemberdayaan bagi umat terutama dalam bidang ekonomi. Mengimplementasikan pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan dakwah *bil hal* (tindakan) serta melaksanakan ilmu-ilmu yang diajarkan secara kongkrit. Memenuhi kegiatan ekonomi adalah amanah Allah SWT⁴⁴ sebagaimana dalam firmanNya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)

Aplikasi kesejahteraan di dunia harus sesuai yang diajarkan oleh Islam, yaitu jauh dari saling mendzolimi atau mengeksploitasi ekonomi.⁴⁵ Harus berkeadilan, jujur serta memikirkan kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari kesejahteraan.⁴⁶ Konsep Islam tersebut seharusnya menjadi pijakan pesantren untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, membimbing dan mendampingi umat. Dengan demikian status harta secara *de jure* yang menjadi milik manusia menghasilkan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Allah SWT memiliki implikasi.⁴⁷ Melihat hal tersebut sebenarnya pesantren mempunyai kekuatan yang bisa dimanfaatkan pesantren untuk melakukan pemberdayaan dalam ekonomi kerakyatan. Pesantren yang secara langsung bersentuhan dengan umat bisa menjadi media pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Pengaruh pondok pesantren kepada para santri, alumni, simpatisan serta masyarakat sekitar memberikan rasa empati kepada sesama agar

⁴⁴ Muh. Syafi’I Antonio. “Bank Syari’ah dari Teori ke Paraktek”. (Jakarta, Gema Insani, 2001), 143. Lihat juga dalam Yusuf Qardhawi. “Daur al-Qiyam wa al-Akblaq fi al-Iqtisad al-Islami.” (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 24.

⁴⁵ A. Qodri Azizy. “Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Menerepong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

⁴⁶ Al-Bahi. “Manhaj Al-Qur’an fi Tawtir al-Mujtama’.” (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 157.

⁴⁷ Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/DOI:10.21580/economica.2015.6.1.785>.

senantiasa memperhatikan lingkungan sosial.⁴⁸ Pesantren mengenalkan pasal-pasal *mu'amalah* (interaksi sosial) sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terperinci.⁴⁹ Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.⁵⁰ Semangat pondok pesantren memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memasukkan kurikulum keterampilan,⁵¹ usaha kreatif dll untuk bekal para santri di kemudian hari.

Aspek lain signifikansi pelibatan pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Madura yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya berada di daerah pedesaan. Pada posisi tersebut, pondok pesantren yang pada kenyataannya memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan,⁵² merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan. Secara tidak langsung masyarakat sekitar mengapresiasi usaha pesantren melakukan pemberdayaan ekonomi kepada mereka, disebabkan juga kharismatik yang dimiliki oleh pimpinan pesantren sebagai tokoh masyarakat.⁵³ Kharismatik seorang Kiyai berpengaruh besar terhadap keputusan masyarakat bawah di pulau Madura untuk menggunakan lembaga pembiayaan mikro syariah.

3. Pemberdayaan dan Pendampingan

Strategi pemberdayaan dari tiga *Bayt al-Maal wat Tamwil* yang menjadi obyek penelitian berbeda-beda, Peneliti menemukan strategi dan konsep pendampingan kepada masyarakat kecil di pulau Madura oleh salah satu BMT memberikan efek penguatan jiwa kewirausahaan seta semangat memperbaiki taraf hidup keluarga. Hal tersebut dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, Koperasi rutin memberikan pendampingan serta

⁴⁸ Abd A'la. "Pengembangan Metodologi pemahaman Keagamaan." Makalah disampaikan dalam Mukhtamar Pemikiran Islam di Lingkungan NU, Sukorejo, PBNU, 3-5 Oktober 2003, 4.

⁴⁹ Sahal Mahfudz. "Nuansa Fiqh Sosial." (Yogyakarta: LKiS, 1994), 151.

⁵⁰ Achmad Zaini. "Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education." (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 126.

⁵¹ Abdurrahman Wahid. "Prisma Pemikiran Gus Dur." (Yogyakarta: LKiS, 1999), 114.

⁵² Usman Sunyoto. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38.

⁵³ Huub de Jonge. "Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi." (Jakarta: Gramedia, 1989), 242-244.

pemberdayaan ekonomi kepada para anggota melalui workshop, seminar dan pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha yang terdaftar sebagai anggota Koperasi. Pendampingan diberikan oleh pihak Koperasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya bergerak pada bidang keuntungan (laba), tetapi juga pada sosial (nirlaba) seperti pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat kecil.

Strategi pemberdayaan dan model pemberdayaan Koperasi An-Nisa' sejalan dengan pemikiran Suharto⁵⁴ bahwa pemberdayaan melalui 5 (lima) "P" yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. *Pemungkinan*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat perbaikan taraf hidup keluarga.⁵⁵ *Penguatan*, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kemampuan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.⁵⁶ *Perlindungan*, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah,⁵⁷ dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.⁵⁸ *Penyokongan*, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-

⁵⁴ Edi Suharto. "Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran." (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997), 218-219.

⁵⁵ Stefanie Chambers, "Minority Empowerment and Environmental Justice," *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28-54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.

⁵⁶ Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, "Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment," in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75-96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.

⁵⁷ Md Mahmudul Alam, Salwana Hassan, and Jamaliah Said, "Performance of Islamic Microcredit in Perspective of Maqasid Al-Shariah: A Case Study on Amanah Ikhtiar Malaysia," *Humanomics* 31, no. 4 (November 9, 2015): 374-84, <https://doi.org/10.1108/H-12-2014-0072>.

⁵⁸ M. Umer Chapra, "The Economic System of Islam". (Lahore: Oxford University Press, 1970), 4. Lihat juga dalam Lauren Gurrieri et al., "Social Marketing and Social Movements: Creating Inclusive Social Change Coalitions," *Journal of Social Marketing* 8, no. 4 (August 8, 2018): 354-77, <https://doi.org/10.1108/JSOCM-12-2016-0078>.

tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.⁵⁹ *Pemeliharaan*, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁶⁰

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Silkhondze, orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok.⁶¹ Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* serta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat lebih dominan. Pemberdayaan tanpa pendampingan tidak akan bisa menghasilkan pribadi-pribadi inovatif, kreatif, imajinatif dan visioner.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Tidak cukup mengandalkan lembaga keuangan mikro syariah, tetapi juga harus melibatkan instansi-instansi terkait dalam hal pemberdayaan, pendampingan, pembinaan dll untuk lebih cepat menciptakan keberhasilan iklim usaha skala usaha mikro. Berikut pada tabel 1.3 Peneliti mengidentifikasi analisis kebutuhan pemberdayaan dan pendampingan bagi UMKM dari berbagai *stakeholder* di pulau Madura.

⁵⁹ Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, "The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution," *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.

⁶⁰ Halima Begum et al., "Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach," *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.

⁶¹ Sikhondze, Wilson B. "The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland". *Adult Education and Development* No. 53 (1999), Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DW.

Tabel: 1.3
 Analisis Kebutuhan Pemberdayaan dan Pendampingan Bagi UMKM Dari
 Berbagai *Stakeholder* di Pulau Madura

NO	KEBUTUHAN PEMBELAJARAN	KEBUTUHAN LEMBAGA DAN ANGGOTA SEKARANG	
		INSTITUSI	KEGIATAN
1	Kemampuan Managemen	Disperindag dan PKM Perguruan tinggi LSM Disnaker Diskop UMKM	Pelatihan Pembinaan Pengabdian Masyarakat Bimbingan usaha Kursus Magang Workshop
2	Kemampuan Teknologi	Disperindag dan PKM Perguruan tinggi LSM Sekolah kejuruan, Disnaker	Pelatihan Pembinaan Pengabdian Masyarakat Bimbingan usaha Kursus Magang
3	Pengetahuan Permodalan	Disperindag dan Diskop UMKM	Pembinaan Pelatihan
4	Pengembangan Pemasaran	Disperindag	Pembinaan organisasi Pendaftaram Perizinan Pembinaan niaga Kemitraan Pembinaan Koperasi
5	Peningkatan Kewirausahaan	Disperindagkop Diskop UMKM Perguruan tinggi LSM Disnaker	Pelatihan-pelatihan

6	Layanan Permodalan	Perbankan BUMN	Promosi pinjaman Modal terkait proyek
7	Pengelolaan Resiko	Diskop UMKM	Pelatihan Pembinaan Bimbingan usaha

Analisis kebutuhan pemberdayaan dan pendampingan di atas menjadi solusi bersama terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk juga kepada tiga lembaga keuangan miro syariah (LKMS) yang Peneliti jadikan obyek penelitian saat ini untuk terus melakukan pendampingan dan bermitra dengan para *stakeholders* terkait agar mendapatkan hasil maksimal dalam melakukan pemberdayaan serta pendampingan kepada para anggota. Pada tabel 1.4 Peneliti juga melakukan pemetaan pemberdayaan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh tiga obyek penelitian.

Tabel: 1.4
Peta Pemberdayaan dan Pendampingan Oleh Lembaga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Pulau Madura

NO	NAMA LKMS	KEGIATAN	
		PEMBERDAYAAN	PENDAMPINGAN
1	Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU	1. Memberikan akses pembiayaan murah kepada masyarakat kecil	1. Pelatihan 2. Pembinaan 3. Bimbingan Usaha 4. Seminar 5. Workshop
2	BMT NU	1. Memberikan akses pembiayaan murah kepada masyarakat kecil 2. Menyediakan produk simpanan saling menguntungkan 3. Menyediakan produk jasa yang terpercaya	1. Memberikan tawaran solusi bila terjadi masalah atau kendala usaha
3	BMT Sidogiri	1. Memberikan akses pembiayaan murah	1. Memberikan tawaran solusi bila terjadi

		kepada masyarakat kecil 2. Menyediakan produk simpanan saling menguntungkan 3. Menyediakan produk jasa yang terpercaya	masalah atau kendala usaha
--	--	--	----------------------------

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Madura melalui lembaga keuangan mikro syariah berbasis Nahdlatul Ulama tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi merupakan gerakan sosial yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman, kultur pesantren, dan solidaritas Nahdliyyin. Tiga lembaga yang menjadi fokus kajian—Koperasi An-Nisa’ IX Muslimat NU, BMT NU, dan BMT Sidogiri—menerapkan strategi pemberdayaan yang terstruktur melalui empat pilar utama: militansi tokoh dan organisasi keagamaan, peran pesantren sebagai pusat sosial-ekonomi, pendampingan berkelanjutan, serta inovasi produk dan layanan berbasis kebutuhan anggota.

Hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis nilai agama dan budaya lokal lebih efektif dalam membangun partisipasi masyarakat akar rumput dibanding pendekatan berbasis proyek semata. Dalam konteks Madura, kekuatan simbolik dan sosial Nahdlatul Ulama terbukti menjadi instrumen penting dalam memperkuat akses ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan mendorong transformasi sosial komunitas marjinal.

Secara konseptual, temuan ini mengafirmasi bahwa gerakan sosial Islam berbasis komunitas keagamaan memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang mengintegrasikan pendekatan spiritual, struktural, dan kultural dapat menjadi model alternatif dalam pengembangan ekonomi mikro di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial serupa.

Daftar Pustaka

- Al Qorni, Farid Ilham, Nuri Herachwati, Akhmad Rofiki, and Ridan Muhtadi. "Analisis Manajemen Sumber Daya Insani Pada Koperasi Guna Mencapai Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 425-443.
- Ababil, Ryval, Ridan Muhtadi, and Ririn Tri Ratnasari. "Model Optimalisasi Integrasi Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Pondok Pesantren Di Madura." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 45-60.
- Ardiansyah, Firman, Fitriyana Agustin, and Ridan Muhtadi. "Digitalisasi filantropi Islam pada pesantren di Pulau Madura." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 1, no. 2 (2021): 225-255.
- Ardiansyah, Firman, Nabila Yuli Firdaus, and Ridan Muhtadi. "Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan." *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 153-164.
- Arifin, Nur Rachmat, Ridan Muhtadi, and Sri Herianingrum. "Small and Medium Enterprise Perception of Halal Certification Post Formalization of Islamic City Branding." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 4, no. 1 (2019): 601-610.
- Arifin, Nur Rachmat, Tamimah Tamimah, Ridan Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, and Moch Qosyim. "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 169-188.
- Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal ASKETIK Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016*, 45-55, 48.
<https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/410>
- Handayana, Rachmad, and Sjahrul Bustaman. "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor* (2007)

- Asih Marini Wulandari pada acara *Business Conference* tanggal 6 Desember 2012 di Fisip Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan judul “*Microfinance Syariah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, 2.
http://repository.upnyk.ac.id/4833/3/3_Asih_ABUPNYK.pdf
- Jhon Kenneth Galbraith. “*The Nature Mass Peverty*” (London: Harvard University Press, 1979)
- Mohammed El-Komi & Rachel Croson, *Experiment in Islamic Microfinance*. (Dallas: University of Texas, 2011)
- Hans Dieter SEIBEL, “Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 1 (2008): 86–103, <https://www.jstor.org/stable/41220061>.
- Herry, Ervicaninda, Pramudia Yuli Eka Permana, Wisnu Bayu Aji, and Ridan Muhtadi. "Total quality management development and sharia governance efforts in sharia micro financial institutions to improve market share." *IJIEEB International Journal of Integrated Education, Engineering and Business eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312* 2, no. 1 (2019): 27-35.
- Ihsan, Fanani Mafatikul, Pramudia Yuly Eka Permana, Nur Rachmat Arifin, and Ridan Muhtadi. "Islamic Boarding Schools Toward the Industrial Revolution 4.0; Opportunities and Challenges." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 9, no. 01 (2020).
- Mubyarto “*Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*” dalam bukunya “*Ekonomi Kerakyatan*” (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014)
- Nila, Faridatun, R. Wahyu Agung Utama, Imron Mawardi, Moh Fudholi, and Ridan Muhtadi. "Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 38-48.
- Nurullah “Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia” *Jurnal HIKAMUNA Edisi 1 Vol. I Tahun 2016*, 16-32, 16.
- Rosyidah, Faridatur, Firman Ardiansyah, and Ridan Muhtadi. "Bumdesma Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad

- Syariah Di Kabupaten Pamekasan." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 1, no. 2 (2021): 193-224.
- Taufik, "Kemiskinan, Perempuan dan Agama". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 145-164, (Juni, 2015), 150.
<http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i1.325>
- <http://www.nu.or.id/post/read/63295/pesantren-sidogiri-mercusuar-pengembangan-ekonomi-syariah> pada tanggal 24 Juni 2021.
- Kinanti, Risma Ayu, Safarinda Imani, Bahrina Almas, and Ridan Muhtadi. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Social Entrepreneurship." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 54-65.
- Rahman, Ahmad Taufiqur, Aunur Rofiq, and Ridan Muhtadi. "Analisis Partisipasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana (Funding) Lazisnu Kota Sumenep." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 243-260.
- Utama, RB Dandy Raga, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 3, no. 2 (2018): 451-457.
- Moleong, Lexy. J, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Muhtadi, Ridan, Firman Ardiansyah, Sakinah Sakinah, and Fitriyana Agustin. "Waqf Forestry Integration Model with Islamic Boarding School in Optimizing the OPOP (One Pesantren One Product) Program." In *Proceeding of International Annual Conference on Islamic Economy and Law*, vol. 1, no. 2, pp. 185-197. 2022.
- Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, and Mumuh Muhammad. "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 53-71.
- Mohammad Natsir, *"Metode Penelitian"*. (Jakarta: Ghalai Indonesia, 1998)
- Jhon W. Creswell, *"Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches"*. (USA: Sage Publications, 2009)

Minto Waluyo. “Panduan dan Aplikasi Struktural Equation Modelling untuk Aplikasi Model dalam Penelitian Teknik Industri, Psikologi, Sosial dan Manajemen.” (Jakarta: PT Indeks, 2011)

Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (June 15, 2013): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> (diakses pada Jum'at, 13 September 2019).

Katharine Esty, “Lessons from Muhammad Yunus and the Grameen Bank: Leading Long-Term Organizational Change Successfully,” in *Leading and Managing in the Social Sector: Strategies for Advancing Human Dignity and Social Justice*, ed. S. Aqeel Tirmizi and John D. Vogelsang, Management for Professionals (Cham: Springer International Publishing, 2017), 31–39, https://doi.org/10.1007/978-3-319-47045-0_3.

Samuel O. Idowu et al., eds., “Lending for Poverty Eradication, Professor Muhammad Yunus,” in *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013), 1585–1585, https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100988.

Howe, N. and Strauss, W. “*Millennials Rising: The Next Great Generation*”. (New York: Vintage Books, 2000)

World Bank. “*Nigeria: Poverty in the Midst of Plenty: The Challenge of Growth with Inclusion: A World Bank Poverty Assessment*”. World Bank, Washington, DC, 1996), 97. Bisa dilihat juga dalam jurnal Emmanuel O. Okon, “MSMEs Performance in Nigeria: A Review of Supply Chain Collaboration Challenges,” *International Journal of Marketing Research Innovation* 2, no. 1 (January 20, 2018): 16–30, <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijmri/article/view/103>.

Christensen, Clayton M., Efosa Ojomo, and Derek van Bever. “Africa's New Generation of Innovators”. *Harvard Business Review* 95, no. 1 (January-February 2017): 129-136.

Ikedinachi K. Ogamba, “Millennials Empowerment: Youth Entrepreneurship for Sustainable Development,” *World Journal of Entrepreneurship*,

- Management and Sustainable Development*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2018-0048>.
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Fealy, Greg, Barton, Greg (ed.), *“Tradisionalis Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara”*. (Yogyakarta: LKiS, 1997)
- Berita Nahdlatoele Oelama, 15 Februari 1939
- Stefanie Chambers, “Minority Empowerment and Environmental Justice,” *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.
- ¹ Khusniati Rofiah, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (December 1, 2010): 1-22–22, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.755>.
- Sahal Mahfudh. *“Nuansa Fikih Sosial”*. Cet. II. (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmadi Syafie. *“Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi”*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Michael W. Browne and Robert Cudeck, “Alternative Ways of Assessing Model Fit,” *Sociological Methods & Research* 21, no. 2 (November 1, 1992): 230–58, <https://doi.org/10.1177/0049124192021002005>. Lihat juga dalam Wijanto, Setyo Hari. *“Structural equation modeling dengan Lisrel 8.8: konsep dan tutorial.”* (Yogyakarta: Graha Ilmu 3.1, 2008)
- R. Andi Irawan, “Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 169–82, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/11/7>.
- Qodri A. Azizy. *“Melawan Globalisasi”*. Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Vandana Desai, “NGOs, Gender Mainstreaming, and Urban Poor Communities in Mumbai,” *Gender and Development* 13, no. 2 (2005): 90–98. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332290>

- Teegen, Hildy, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani. "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda." *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463-83. <http://www.jstor.org/stable/3875234>.
- Biswajit Ghosh, "NGOs, Civil Society and Social Reconstruction in Contemporary India," *Journal of Developing Societies* 25, no. 2 (April 1, 2009): 229–52, <https://doi.org/10.1177/0169796X0902500205>.
- Arief Subhan. "*Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*." (Jakarta: Kencana, 2012), 189.
- Oman Fathurahman, "Jaringan Ulama: Pembaharuan Dan Rekonsiliasi Dalam Tradisi Intelektual Islam Di Dunia Melayu-Indonesia," *Studia Islamika* 11, no. 2 (2004): 361–85, <https://doi.org/10.15408/sdi.v11i2.606>.
- Azyumardi Azra. "*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*." (Jakarta: Kencana, 2013)
- Amin Haidari, dkk. "*Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*." (Jakarta: IRD Press, 2004)
- Muh. Syafi'i Antonio. "*Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktek*". (Jakarta, Gema Insani, 2001), 143.
- Yusuf Qardhawi. "*Daur al-Qiyam wa al-Akblaq fi al-Iqtisad al-Islami*." (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)
- Karimah, Karimah, Ridan Muhtadi, and Kamali Kamali. "Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 107-131.
- Muhtadi, Ridan, and Arif Rachman Eka Pratama. "Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura." *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga* (2012).
- A. Qodri Azizy. "*Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

- Al-Bahi. “*Manhaj Al-Qur’an fi Tawtir al-Mujtama’*.” (Beirut: Dar al-Fikr, 1974)
- Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/DOI: 10.21580/economica.2015.6.1.785>.
- Abd A’la. “*Pengembangan Metodologi pemahaman Keagamaan*.” Makalah disampaikan dalam Mukhtamar Pemikiran Islam di Lingkungan NU, Sukorejo, PBNU, 3-5 Oktober 2003.
- Sahal Mahfudz. “*Nuansa Fiqh Sosial*.” (Yogyakarta: LKiS, 1994), 151.
- Achmad Zaini. “*Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education*.” (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 126.
- Abdurrahman Wahid. “*Prisma Pemikiran Gus Dur*.” (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- Usman Sunyoto. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Huub de Jonge. “*Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi*.” (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Edi Suharto. “*Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*.” (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997)
- Stefanie Chambers, “Minority Empowerment and Environmental Justice,” *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.
- Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, “Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment,” in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75–96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.
- Md Mahmudul Alam, Salwana Hassan, and Jamaliah Said, “Performance of Islamic Microcredit in Perspective of Maqasid Al-Shariah: A Case Study on Amanah Ikhtiar Malaysia,” *Humanomics* 31, no. 4 (November 9, 2015): 374–84, <https://doi.org/10.1108/H-12-2014-0072>.
- M. Umer Chapra, “*The Economic System of Islam*”. (Lahore: Oxford University Press, 1970), 4. Lihat juga dalam Lauren Gurrieri et al., “Social Marketing

and Social Movements: Creating Inclusive Social Change Coalitions,” *Journal of Social Marketing* 8, no. 4 (August 8, 2018): 354–77, <https://doi.org/10.1108/JSOCM-12-2016-0078>.

Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, “The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution,” *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.

Halima Begum et al., “Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach,” *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.

Sikhondze, Wilson B. “The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland”. *Adult Education and Development* No. 53 (1999), Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DW.

Suhendi, Ahmad, “Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,” *Informasi* 18, No. 2 (1 Juli, 2013): 105-116, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>

Wahab, Abd, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. "Rancang bangun strategi pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif berbasis model Sharia Grameen Bank di era new normal." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18-36.